

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2017



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2017**

Nomor Publikasi	: 73010.1823
Katalog BPS	: 7203007.7301
Ukuran Buku	: 14.8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: viii + 58
Naskah	: Yusup Rujiyanto, S.ST Giovanni SPP, S.ST Achmad Kautsaro, S.ST
Penyunting	: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar
Gambar Kulit	: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar
Penerbit	: © BPS Kabupaten Kepulauan Selayar
Pencetak	: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

**Dilarang mengumumkan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi
buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 merupakan hasil pengolahan dari Survei Keuangan Daerah Tingkat II (K2) yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. Publikasi ini menyajikan data Realisasi penerimaan dan Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. Ada pula Lampiran mengenai Survey Keuangan Desa Tahun 2017 dan 2018 serta Keadaan Keuangan Bank Umum dan BPR Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

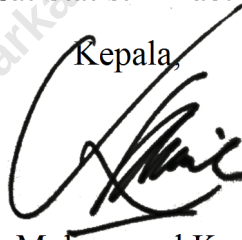
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Benteng, Agustus 2018

Badan Pusat Statistik Kab. Kep. Selayar

Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamil', is written over a faint, diagonal watermark that reads 'https://selayarkab.bps.go.id'.

Ir. Muhammad Kamil

NIP 196804291994011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
2.2 Konsep dan Definisi.....	5
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	27
3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	27
3.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	33
3.3 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan	37
3.4 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah	40
3.5 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah.....	43
3.6 Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Fungsi	48
3.7 Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah.....	49
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran dan Kritik	54

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 (Ribu Rupiah)	29
2	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Kepulauan Selayar Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	30
3	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	34
4	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	38
5	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	41
6	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 (Ribuan Rupiah)	44
7	Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 -2017 (Ribuan rupiah)	46
8	Persentase Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2017	49

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
9	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2017 (Ribuan Rupiah)	51

<https://selayarkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik	Judul Grafik	Halaman
Grafik 1.	Persentase Jenis Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013-2017	33
Grafik 2.	Realisasi Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	36
Grafik 3.	Persentase Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2013 – 2017	47
Grafik 4.	Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Surplus/Defisit APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 -2017(Milyar Rupiah)	50

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul lampiran	Halaman
Lampiran 1.	Rata-rata Realisasi APBDes Desa Tahun 2016 – 2017 Di Kabupaten Kepulauan Selayar	56
Lampiran 2.	Rata-rata Anggaran APBDes Desa Tahun 2017 – 2018 Di Kabupaten Kepulauan Selayar	57
Lampiran 3.	Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)	58

<https://selayarkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No 13 Tahun 2006). APBD merupakan instrument yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya sendiri.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin

dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Utamanya di kabupaten Kepulauan Selayar yang wilayahnya kepulauan, diharapkan pembangunan bukan hanya dirasakan di ibukota kabupaten saja namun juga mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil sehingga pertumbuhan ekonomi merata di semua wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2 Tujuan

Penanganan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif dan efisien. Untuk itu, statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semakin diperlukan terutama digunakan untuk:

1. Sebagai bahan penghitungan PDRB neraca ekonomi kabupaten, tabel input-output dan neraca arus dana.

2. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Mengetahui potensi dan peranan sumber dana di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah yang dikumpulkan setiap tahun oleh BPS melalui Survei Statistik Keuangan Daerah. Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari:

1. Anggaran penerimaan daerah otonomi Kabupaten menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2017 dan Realisasi Penerimaan atau Pendapatan Daerah 2017.
2. Anggaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun

anggaran 2017 dan Realisasi Pengeluaran atau Belanja Daerah 2017.

Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah tersebut dikompilasi menggunakan kuesioner K-2, sedangkan data anggaran dicatat menggunakan kuesioner APBD-2.

2.2 Konsep dan Definisi

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan publikasi yang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah selama periode tahun 2017. Daftar isian keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang

terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi

izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi,

potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTPB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tiga kriteria kebutuhan khusus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari

rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Hasil penjualan kekayaan daerah adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

Penerimaan kembali pemberi pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank indonesia (SBI), surat perbendaharaan negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi, dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang mencakup tiga komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit yang bermakna bahwa pemerintah daerah boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatan. Selain itu, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga hampir setiap tahunnya selalu ada variansi antara anggaran dan realisasi.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya tidak selalu 100 persen, hal ini disebabkan terdapat sumber penerimaan yang kurang dari target tetapi ada juga penerimaan lain yang melebihi target. Tahun 2017, realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 104,66%. Anggaran penerimaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sebesar Rp859.090.097.000,00 dan terealisasi sebesar Rp899.122.565.000,00. Realisasi penerimaan daerah pada tahun 2017 melebihi 100 persen karena terdapat dua sumber penerimaan daerah yang realisasinya melebihi 100 persen yaitu pendapatan asli daerah sebesar 136,15% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 124,72%. Penerimaan pendapatan daerah yang melebihi 100 persen menunjukkan kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar. Tabel 1 menyajikan data anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2017.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah	57,175,028	77,841,130	136.15
Dana Perimbangan	712,313,398	709,530,394	99.61
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	89,601,671	111,751,041	124.72
Jumlah	859,090,097	899,122,565	104.66

Sumber: Survei APBD-2 2017 dan K-2 2017

Sumber penerimaan pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 80-90 persen, pada tahun 2017 penerimaan dari dana perimbangan turun menjadi 78,91%. Penerimaan pendapatan daerah yang masih didominasi dana perimbangan

mengindikasikan bahwa sumber pendapatan daerah dalam kondisi ketergantungan (*dependable*). Selama tahun 2013-2017, rata-rata penerimaan pendapatan daerah dari masing-masing sumber sebesar 5,59% dari pendapatan asli daerah, 82,42% dari dana perimbangan, dan 12% dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi penerimaan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	22,391,990	35,602,099	40,231,013	43,181,943	77,841,130
Dana Perimbangan	519,597,570	547,019,012	603,533,542	751,553,019	709,530,394
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66,043,880	87,597,988	107,989,249	81,116,612	111,751,041
Jumlah	608,033,440	670,219,099	751,753,804	875,851,574	899,122,565

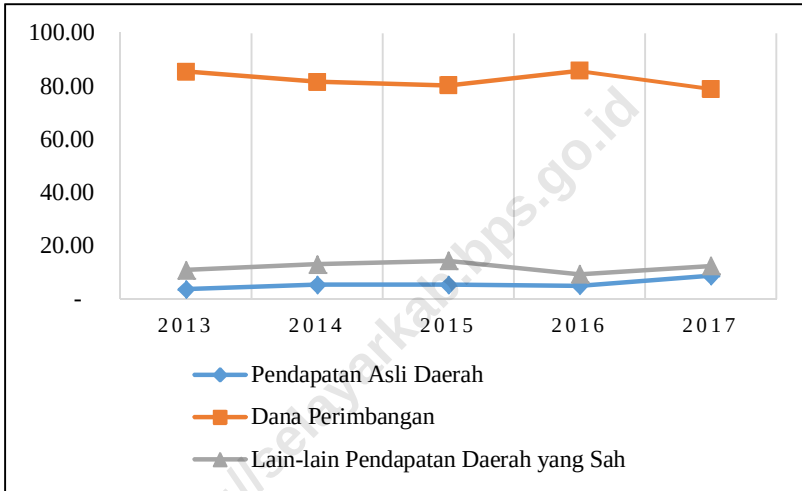
Sumber: Survei K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

Grafik 1 menyajikan persentase sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah tahun 2013-2017. Dana perimbangan menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah dengan proporsi terbesar, lebih dari 50 persen penerimaan pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan. Meskipun menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah terbesar, dana perimbangan selama lima tahun terakhir memiliki tren cenderung menurun yang berarti sumber penerimaan pendapatan daerah lainnya mengalami peningkatan. Persentase dana perimbangan tahun 2017 sebesar 78,91% menjadi persentase terendah selama lima tahun terakhir, dibandingkan tahun sebelumnya persentase dana perimbangan tahun 2017 turun sebesar 6,89%.

Tren menurun dana perimbangan berbanding terbalik dengan tren sumber penerimaan pendapatan daerah yang lain. Pendapatan asli daerah dan lain-lain

pendapatan yang sah memiliki tren cenderung naik meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan persentase lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah sehingga dapat disimpulkan pendapatan asli daerah cenderung lebih stabil. Pendapatan asli daerah memiliki yang lebih cenderung stabil dapat dijadikan dasar pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pendapat daerah melalui sumber ini dengan mengoptimalkan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah seperti pajak, PBB, pajak dan retribusi hotel, restoran dan akomodasi lainnya, dan lain-lain sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Grafik 1. Persentase Jenis Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013-2017



3.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 mencapai Rp77.841.130.000,00 atau sebesar 8,66% dari total penerimaan pendapatan daerah.

Sumber PAD terbagi kedalam empat kelompok yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tabel 3 menyajikan rincian penerimaan PAD dari keempat sumber tersebut.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Rincian Sumber PAD	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil Pajak Daerah	2,457,848	4,184,917	6,087,786	6,635,497	7,480,796
Hasil Retribusi Daerah	2,653,681	7,376,166	8,750,481	10,672,596	1,527,407
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,162,296	7,587,079	9,762,029	10,584,860	11,164,787
Lain-lain PAD yang Sah	10,118,165	16,453,937	15,630,717	15,288,990	57,668,140
Pendapatan Asli Daerah	22,391,990	35,602,099	40,231,013	43,181,943	77,841,130

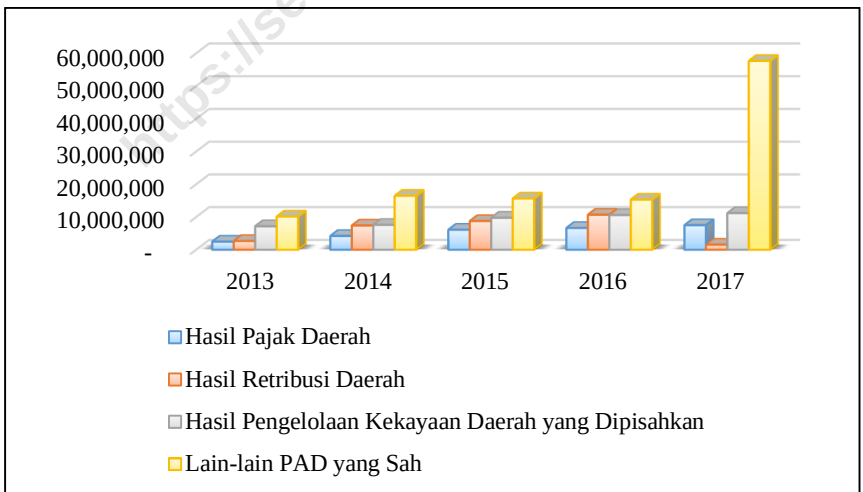
Sumber: Survei K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

Penerimaan PAD dari tahun ke tahun selama periode 2013-2017 selalu mengalami kenaikan, kenaikan

tertinggi terjadi pada tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 penerimaan PAD naik sebesar Rp34.659.187.000,00. Grafik 2 menggambarkan penerimaan PAD berdasarkan sumber tahun 2013-2017. Berdasarkan Grafik 2, sumber penerimaan PAD dari hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Hasil retribusi daerah selama tahun 2013-2014 juga memiliki tren meningkat tetapi pada tahun 2017 hasil retribusi daerah mengalami penurunan, penurunan hasil retribusi daerah pada tahun 2017 cukup drastis yakni dari Rp10.672.596.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp1.527.407,00 pada tahun 2017. Lain-lain PAD yang sah memiliki tren yang berbeda dibandingkan ketiga sumber PAD lainnya, lain-lain PAD yang sah berfluktuasi dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2017, selama tahun

2013-2017 *range* lain-lain PAD yang sah antara Rp10.000.000.000,00 sampai Rp16.500.000.000,00 tetapi pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp57.668.140,00, peningkatan sumber lain-lain PAD yang sah merupakan faktor utama penyebab PAD tahun 2017 tertinggi selama lima tahun terakhir.

Grafik 2. Realisasi Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)



3.3 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 mencapai Rp709.530.394.000,00 atau sebesar 78,91% dari total penerimaan pendapatan daerah. Sumber dana perimbangan terbagi kedalam empat kelompok yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Tabel 4 menyajikan rincian penerimaan dana perimbangan dari keempat sumber tersebut.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Rincian Sumber Dana Perimbangan	2013	2014	2015	2016	2017
Bagi Hasil Pajak	21,607,246	15,361,544	13,590,338	13,471,678	10,391,107
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,574,872	3,829,426	3,756,144	8,177,651	3,517,279
Dana Alokasi Umum (DAU)	421,256,593	458,019,013	479,393,610	535,836,163	531,175,255
Dana Alokasi Khusus (DAK)	75,158,860	69,809,030	106,793,450	194,067,527	164,446,753
Dana Perimbangan	519,597,571	547,019,013	603,533,542	751,553,019	709,530,394

Sumber: Survei K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

Penerimaan dana perimbangan selama periode 2013-2017 memiliki tren berbeda dengan PAD, tren PAD selama periode tersebut selalu naik sedangkan tren dana perimbangan naik dari tahun 2013 sampai 2016 tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penerimaan

dana perimbangan tahun 2017 mengalami penurunan akibat semua sumber penerimaan dana perimbangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Sumber penerimaan dana perimbangan memiliki tren yang berbeda, selama periode 2013 sampai 2016 bagi hasil bukan pajak dan DAU selalu mengalami kenaikan, sedangkan DAK berfluktuasi. DAK mengalami penurunan pada tahun 2014 tetapi pada dua tahun berikutnya mengalami kenaikan. Sumber penerimaan dana perimbangan lainnya adalah bagi hasil pajak, berbeda dengan sumber penerimaan dana perimbangan lainnya yang memiliki tren meningkat dan fluktuatif tren bagi hasil pajak selama periode 2013-2017 selalu menurun. Bagi hasil pajak pada tahun 2017 tidak mencapai setengah dari dana bagi hasil pajak tahun 2013, pada tahun 2013 dana bagi hasil pajak mencapai

Rp21.607.246.000,00 sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai Rp10.391.107.000,00.

3.4 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 mencapai Rp111.751.041,00 atau sebesar 12,43% dari total penerimaan pendapatan daerah. Sumber lain-lain pendapatan yang sah terbagi kedalam enam kelompok yaitu pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana desa. Tabel 5 menyajikan rincian penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dari keenam sumber tersebut.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sumber Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Rincian Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Hibah	-	-	6,295,488	-	15,000,000
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,593,087	17,713,204	21,680,465	23,958,749	26,850,357
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44,530,513	63,375,993	74,410,884	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,920,280	6,508,791	5,602,412	6,310,878	5,191,299
Dana Desa	-	-	-	50,846,985	64,709,385
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66,043,880	87,597,988	107,989,249	81,116,612	111,751,041

Sumber: Survei K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah selama periode 2013-2017 memiliki tren berbeda dengan PAD dan dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah lebih lebih fluktuatif dibandingkan kedua sumber pendapatan daerah tersebut. Lain-lain pendapatan yang sah lebih fluktuatif karena tidak setiap tahun pemerintah daerah menerima pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan dana desa. Pendapatan hibah diterima tahun 2015 dan 2017, dana penyesuaian dan otonomi khusus diterima tahun 2013-2015, dan dana desa diterima tahun 2016 dan 2017. Sumber lain-lain pendapatan yang sah yang selalu diterima pemerintah daerah dari tahun ke tahun selama periode 2013-2017 adalah dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, sedangkan dana darurat belum pernah diterima pemerintah daerah. Dua sumber lain-lain pendapatan yang sah yang selalu

diterima setiap tahun memiliki tren yang berbeda, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun sedangkan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya cenderung fluktuatif.

3.5 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah

Anggaran pengeluaran belanja APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sebesar Rp919.364.193.000,00 dan terealisasi sebesar Rp865.699.931.000,00. Realisasi pengeluaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 mencapai 94,16%, realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai 92,25%. Peningkatan realisasi pengeluaran belanja daerah yang meningkat menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah

daerah pada tahun 2017. Tabel 6 menyajikan data anggaran dan realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2017.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 (Ribuan Rupiah)

Rincian Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian (%)
Belanja Pegawai	399,967,465	345,318,976	86.34
Belanja Barang dan Jasa	199,690,609	213,838,786	107.09
Belanja Modal	178,472,089	173,007,970	96.94
Belanja Lain-lain (Hibah, Darurat, Subsidi, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan)	141,234,030	133,534,199	94.55
Belanja Daerah	919,364,193	865,699,931	94.16

Sumber: Survei APBD-2 2017 dan K-2 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah diatas 90 persen. Ini berarti serapan anggaran daerah sangat baik. Banyak program kegiatan maupun pembangunan infrastruktur terealisasi Capaian realisasi Belanja Pegawai dibawah 90 % menandakan bahwa Pemerinatah daerah mencoba untuk mengefisienkan pemakaian belanja pegawai namun dengan hasil pelayanan publik yang optimal.

Total belanja daerah meningkat sebesar sebesar 46 % dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh makin beragamnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, upaya mendorong pembangunan daerah baik itu SDM maupun infrastruktur daerah khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

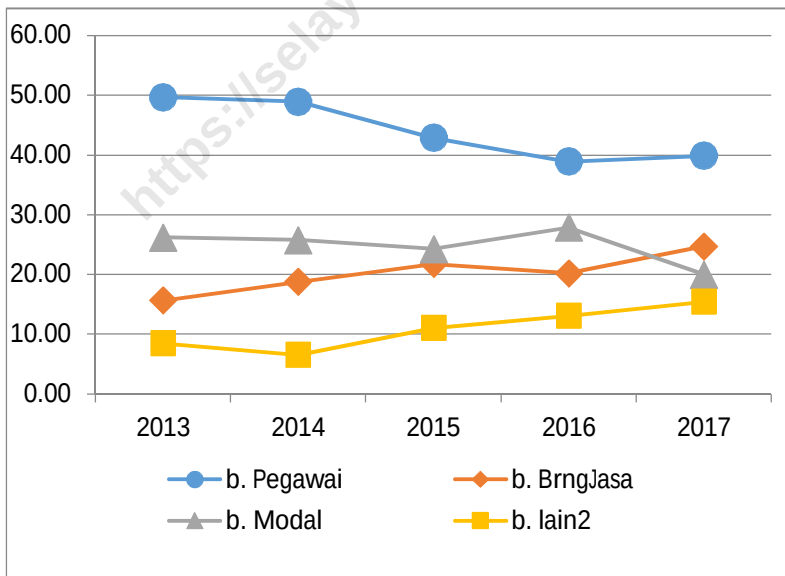
Tabel 7 Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 -2017 (Ribuan rupiah)

Jenis Belanja Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	295.275.713	320.126.798	322.049.026	342.387.524	345.318.976
Belanja Barang dan Jasa	92.838.801	122.905.607	163.533.948	177.553.851	213.838.786
Belanja Modal	155.768.157	168.765.462	182.359.602	245.188.421	173.007.970
Belanja Lain-lain (Hibah, Darurat, Subsidi, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan)	50.229.080	42.768.116	83.022.381	114.927.824	133.534.199
Belanja Daerah	594.111.751	654.565.983	750.964.957	880.057.620	865.699.931

Dari ke empat – besar jenis belanja tersebut, Belanja barang dan jasa, modal, serta belanja lainnya relatif meningkat secara konstan. Akan tetapi untuk Belanja pegawai proporsinya menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah berupaya memaksimalkan fungsi pelayanan publik atau masyarakat namun dengan

mengupayakan seefisien mungkin anggaran belanja pegawai. Dari tahun 2013 – 2017, jumlah belanja pegawai turun proporsinya hingga 17 %, sedangkan belanja modal proporsinya naik hingga 11 %. Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja lain-lain proporsinya naik 3 – 4 %. Gambaran persentase jenis belanja daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3 Persentase Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2013 – 2017



3.6 Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Fungsi

Sedangkan Alokasi Belanja Daerah Menurut fungsi APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2017, fungsi – fungsi ekonomi, perumahan dan fasilitas umum dan kesehatan relative meningkat. Sedangkan alokasi untuk fungsi pendidikan relatif menurun disebabkan karena belanja daerah untuk pembangunan gedung sekolah sudah direalisasikan dan tinggal belanja operasional dan pemeliharaan saja. Sedangkan Perumahan dan fasilitas umum mendapat proporsi yang cukup besar karena adanya pembangunan jalan tani, maupun perintisan jalan di wilayah kepulauan serta pembangunan MCK bagi pemukiman padat. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar untuk tiap tahunnya yaitu mencapai 38 % dari total belanja.

Tabel 8 . Persentase Realisai Belanja Daerah Menurut Fungsi APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2017

Rincian Belanja Daerah Menurut Fungsi	2013	2014	2015	2016	2017
Pelayanan Umum	31.97	28.79	33.09	33.95	37.81
Ketertiban dan Keamanan	2.19	2.38	2.76	2.31	2.07
Ekonomi	11.94	13.17	11.23	11.13	8.45
Lingkungan Hidup	2.57	2.92	2.92	2.22	1.99
Perumahan dan Fasilitas Umum	14.54	15.76	13.56	15.65	13.44
Kesehatan	9.46	9.93	9.65	13.90	14.73
Pariwisata dan Budaya	1.16	1.22	1.44	0.96	1.40
Pendidikan	23.98	23.57	23.19	17.86	17.89
Perlindungan Sosial	2.19	2.25	2.17	2.03	2.22
Belanja Daerah	100	100	100	100	100

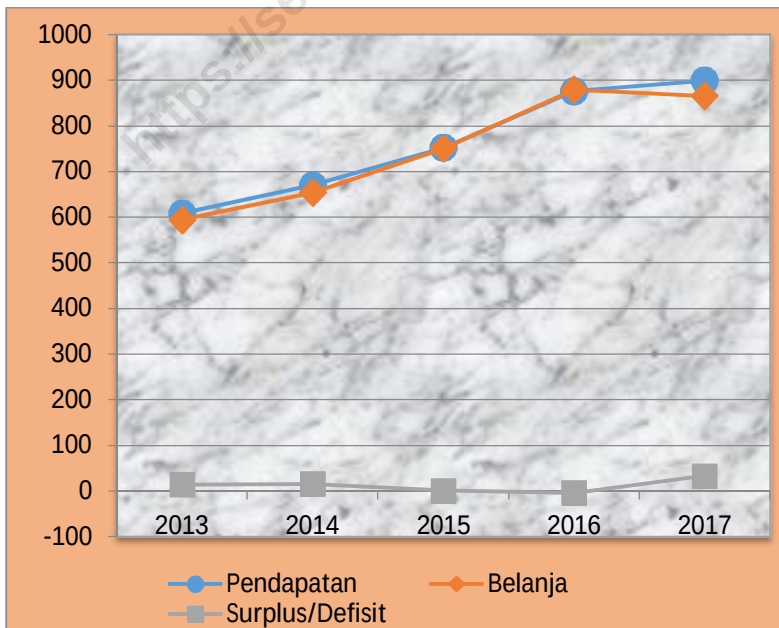
Sumber: Survey K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

3.7 Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana terlihat pada grafik 4 dibawah ini, anggaran daerah Kabupaten Kepulauan selayar dalam tahun

2013 – 2017 menunjukkan pola yang fluktuatif dan dalam persentase terhadap anggaran, angka tersebut masih dapat dikategorikan dalam level yang bisa diterima dengan range kurang dari 10 %. Selama tahun 2017, defisit sekitar Rp 4 milyar, yaitu 0,5 % dari anggaran. Dari grafik ini terlihat pula bahwa realisasi APBD cenderung menunjukkan angka surplus yaitu untuk tahun 2013 – 2015 dan 2017, sementara untuk data anggaran 2016 cenderung menggambarkan APBD defisit.

Grafik 4. Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Surplus/Defisit APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 -2017(Milyar Rupiah)



Sedangkan Untuk Pembiayaan daerah, lebih dari 90 % penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan untuk pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran pokok utang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2017 (Ribuan Rupiah)

Rincian	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Pembiayaan Daerah	34.104.358	47.276.369	62.990.415	63.856.170	59.585.863
SILPA Tahun Sebelumnya	34.018.420	47.182.512	62.929.486	63.779.262	59.209.467
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	85.938	93.857	60.929	76.906	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	376.396
Lainnya	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000	-	-	500.000	3.123.959

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000	-	-	500.000	2.500.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	623.959
Lainnya	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	45.526.047	62.929.486	63.779.262	59.150.124	89.884.538

Sumber: Survey K-2 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan Daerah.

4.2 Saran dan Kritik

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini masih jauh dari kesempurnaan dan terlebihnya memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, pembaca dan pengamat sudi kiranya memberikan pendapat, kritikan dan saran demi perbaikan publikasi ini dimasa yang akan datang.

Harapan besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berhasil memperoleh Prestasi Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah secara WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Semoga di tahun-tahun selanjutnya torehan prestasi bisa terus berlanjut dan dipertahankan. Semuanya guna mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah daerah menyejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Lampiran 1

**Rata-rata Realisasi APBDes Desa Tahun 2016 –
2017 Di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Rata-Rata Realisasi APBDes (Dalam Ribu Rupiah)	
	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)
1 Pendapatan Desa	1.324.328,00	1.466.364,00
2 Pendapatan Asli Desa	4.264,00	6.042,87
3 Dana Desa	622.992,00	784.706,62
4 Alokasi Dana Desa	677.890,00	640.088,62
5 Belanja Desa	1.296.973,00	1.428.270,12
6 Belanja Pegawai	263.012,00	175.203,12
7 Belanja Barang Jasa	578.639,00	664.992,37
8 Belanja Modal	455.322,00	588.074,62

Sumber: Survey K-3 Tahun 2017 dan 2018

Lampiran 2

**Rata-rata Anggaran APBDes Desa Tahun 2017 –
2018 Di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian		Rata-Rata Anggaran APBDes (Dalam Ribu Rupiah)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
(1)		-2	-3
1	Pendapatan Desa	1.504.874,00	1.586.013,00
2	Pendapatan Asli Desa	18.755,00	13.808,60
3	Dana Desa	777.379,75	859.991,00
4	Alokasi Dana Desa	691.135,00	695.437,00
5	Belanja Desa	1.456.481,00	1.587.330,00
6	Belanja Pegawai	192.037,50	189.331,00
7	Belanja Barang Jasa	747.475,12	829.178,00
8	Belanja Modal	516.499,62	562.887,00

Sumber: Survey K-3 Tahun 2017 dan 2018

Lampiran 3

Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

Uraian		Tahun Data				
		2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6
Giro	Nominal	25.187	50.510	49.116	86.108	108.676
	Rekening (satuan)	512	316	363	715	815
Simpanan Berjangka	Nominal	84.673	77.504	99.888	76.358	86.855
	Rekening (satuan)	554	578	643	701	746
Tabungan	Nominal	267.540	318.766	354.822	398.762	418.760
	Rekening (satuan)	42.468	47.610	50.102	59.327	85.121
Kab Kepulauan Selayar		377.400	446.780	503.826	561.228	614.291

Sumber: Kantor BI Perwakilan Propinsi Sul-Sel

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jl. RE. Martadinata No. 5, Benteng, Kepulauan Selayar 92812

Telp. (0414) 21037, E-mail: bps7301@bps.go.id Homepage: <http://selayarkab.bps.go.id>